

Tanda Tangan Peserta Ujian



**BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS  
TAKE HOME EXAM (THE)  
SEMESTER 2023/2024 Genap (2024.1)**

Nama Mahasiswa : Rhiza S. Sadjad  
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 045276176  
Tanggal Lahir : 6 September 1957  
Kode>Nama Mata Kuliah : ISIP4213/Sistem Politik Indonesia  
Kode>Nama Program Studi : 70/Sosiologi  
Kode>Nama UT-Daerah : 80/Makassar  
Hari/Tanggal UAS THE : Jum'at. 5 Juli 2024

**Petunjuk**

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Surat Pernyataan  
MahasiswaKejujuran  
Akademik**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhiza S. Sadjad  
MahasiswaNIM : 045276176  
Kode>Nama Mata : ISIP4213/Sistem Politik Indonesia  
KuliahFakultas : FHISIP  
Program Studi : S1 Sosiologi  
UT-Daerah : Makassar

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman <https://the.ut.ac.id>.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujianUAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarkan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Bogor, 5 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nama Mahasiswa  
Rhiza S. Sadjad

Jawaban di halaman berikutnya



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

**UJIAN AKHIR SEMESTER-TAKE HOME EXAM (THE)**  
**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**SEMESTER: 2023/2024 Genap (2024.1)**  
**Sistem Politik Indonesia ISIP4213**

**Nama : Rhiza S. Sadjad**  
**NIM : 045276176**

Pertanyaan 1 dari 4:

*Kebijakan pemerintah terkait hilirisasi dinilai tepat dan menuai hasil positif terhadap postur neraca perdagangan. Indikator itu tergambarkan dari perubahan struktur Indonesia yang semula fokus pada ekspor komoditas beralih menjadi ekspor manufaktur. Ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 43 bulan berturut-turut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan per November 2023, neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$2,41 miliar dan surplus akumulatif periode Januari-November 2023 mencapai US\$33,63 miliar.*

*Sumber: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7914/hilirisasi-tepat-tuai-hasil-positif?lang=1>*

*Pertanyaan: Analisislah kebijakan hilirisasi di atas dengan menggunakan dua kapabilitas sistem politik dari Gabriel Almond yaitu kapabilitas ekstraktif dan kapabilitas domestik dan internasional!*

Jawaban 1 dari 4:

Dalam artikel dan bukunya: “*A Functional Approach to Comparative Politics*” [1960] (diedit bersama **James S. Coleman**) dan “*Comparative Politics: A Developmental Approach*” [1966] ((ditulis bersama **G. Bingham Powell Jr**), **Gabriel A. Almond** menulis dasar-dasar dari analisis perbandingan politik, untuk memperoleh metode yang terstruktur dalam memahami bagaimana sistem politik bekerja untuk mencapai kestabilan yang efektif. Ada dua kapabilitas sistem politik menurut **Almond**, yaitu (1) *kapabilitas ekstraktif* dan (2) *kapabilitas domestik-internasional*. Dikaitkan dengan kebijakan hilirisasi yang mengalihkan fokus ekspor komoditas ke ekspor manufaktur, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan kedua kapabilitas dari **Almond** tersebut, kurang lebih sebagai berikut:

- (1) **Kapabilitas Ekstraktif**. Pemerintah Indonesia berhasil me-mobilisasi sumber daya masyarakat untuk meningkatkan ekspor, yang semula di-dominasi oleh ekspor komoditas berupa produk bahan mentah dari sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar minyak dan tambang, menjadi ekspor manufaktur - misalnya tekstil dan minyak sawit – yang lebih padat karya, dan lebih dirasakan keuntungannya oleh publik yang lebih luas. Peralihan fokus dari sumber daya alam ke sumber daya masyarakat ini yang dikatakan sebagai pemanfaatan secara efektif kapabilitas ekstraktif dari sistem politik, dalam hal ini pemerintah Indonesia.
- (2) **Kapabilitas Domestik-Internasional**. Karena kebijakan hilirisasi ini terkait dengan ekspor, maka jelas dalam hal ini pemerintah Indonesia telah memanfaatkan kapabilitas domestik-

internasional dalam menyeimbangkan peranan perdagangan domestik dan perdagangan internasional sehingga dicapai neraca perdagangan yang positif seperti ditunjukkan dalam kutipan artikel di atas. Walau pun demikian, ada “sisi gelap” dari kebijakan hilirisasi ini, ketika pemerintah gagal memanfaatkan kapabilitas domestik-internasional ini secara efektif. Contohnya misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik beberapa waktu yang lalu, karena lebih banyak di-ekspor. Contoh yang lain dari kegagalan memanfaatkan kapabilitas domestik-internasional adalah yang terjadi baru-baru ini, ketika pabrik-pabrik manufaktur tekstil yang besar-besar terpaksa melakukan “*down-sizing*” - bahkan ada yang tutup sama-sekali – mengakibatkan PHK besar-besaran. Penyebab utamanya adalah membanjirnya produk tekstil dari luar-negeri – khususnya China – di pasaran dalam negeri yang tidak dapat disaingi oleh produk dalam-negeri.

#### Pertanyaan 2 dari 4:

*Praktisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti, dalam Diskusi Redesain UU Pemilu dan Kodifikasi UU Pemilu di DPR, Februari 2020 memberikan kritik terhadap partai politik di Indonesia yang memiliki kelemahan yang cenderung tidak demokratis. Kelemahan tersebut meliputi sistem pengelolaan partai yang cenderung personalistik dan oligarkis, pembiayaan operasional partai yang bergantung pada elit pimpinan, dan masyarakat yang cenderung melihat tokoh parpol daripada kebijakannya.*

*Sumber: <https://www.medcom.id/nasional/politik/gNOGEA5k-parpol-dinilai-masih-punya-banyak-kelemahan>*

*Pertanyaan: Analisislah kelemahan-kelemahan tersebut dengan memberikan contoh yang relevan! Kaitkan jawaban saudara dengan peranan partai politik yang seharusnya hadir dalam masyarakat!*

#### Jawaban 2 dari 4:

Dalam sistem demokrasi dengan multi-partai, peranan utama dari partai-partai politik adalah: (1) menjadi representasi dari masyarakat, (2) menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, (3) membentuk sistem pemerintahan, (4) menjaga akuntabilitas pemerintahan, (5) mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat, (6) menjadi lembaga pe-rekrut-an calon-calon pemimpin bangsa dan (7) menjadi perekat yang menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Kelemahan-kelemahan partai politik yang dikemukakan oleh **Ramlan Surbakti**, yaitu yang secara umum partai-partai politik dinilai tidak demokratis, dengan rincian antara lain: (a) pengelolaan yang cenderung personalistik dan oligarkis, (b) pembiayaan operasional yang bergantung pada *elite* pimpinan, dan - atau lebih tepatnya sehingga - (c) masyarakat cenderung melihat tokoh-tokoh partai daripada gagasan-gagasan yang diusung partai-partai tersebut.

Sebagai contoh misalnya sebuah Partai X, dengan pemimpin partainya seorang konglomerat yang kaya raya, maka Partai X tersebut di-persepsi sebagai “milik” pemimpin-nya, atau sebagai sebuah

“anak perusahaan” dari grup usaha-nya. Akibatnya peranan (1) yang seharusnya Partai X tersebut menjadi representasi dari masyarakat, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, tidak dapat dilaksanakan oleh Partai X, yang cenderung memperjuangkan kepentingan (usaha) para pemimpinnya. Sering terjadi ada (pemimpin) partai beralih sikap politik-nya hanya karena mendapat tekanan pada lahan usahanya.

Contoh yang lain misalnya Partai Y, yang pemimpinnya dianggap keturunan “dewa” pendiri atau cikal-bakal Partai Y tersebut. Maka Partai Y menjadi seolah-olah barang “warisan”, yang memperjuangkan gagasan-gagasan (yang sering sudah “kuno” alias *out of date*) dari bapak pendiri partai yang harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh anak-keturunan mereka. Dengan demikian Partai Y tersebut menjadi tidak “relevan” lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga tidak bisa berperan sebagai seharusnya dalam peranan (2), (5) dan (6).

Intinya, berbagai kelemahan partai-partai politik sebagaimana dikemukakan oleh **Ramlan Surbakti** dalam kutipan artikel di atas, membuat partai politik tidak lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat sebagaimana tujuan pokok dari sistem demokrasi, melainkan hanya memperjuangkan aspirasi dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu saja.

#### Pertanyaan 3 dari 4:

*Dalam pemberitaan viral di media sosial tahun 2024 ini menunjukkan keluhan dan kritik masyarakat Indonesia terhadap kinerja Bea Cukai Indonesia. Terdapat beberapa kasus terkait yaitu pembelian sepatu olahraga impor yang ditagih pajak 31 juta rupiah, pengiriman bantuan dari luar negeri untuk alat bantu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ditagih ratusan juta dan penahanan produk mainan untuk review dari seorang pemengaruh (influencer). Selain itu banyak kasus pekerja migran yang berkirim barang kepada keluarga dipersulit proses penerimaannya dan denda tarif bea masuk bagi barang-barang pribadi WNI yang datang dari luar negeri.*

*(Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7315093/desakan-agar-bea-cukai-berbenah-buntut-kasus-viral-bea-masuk>)*

*Pertanyaan:*

- a. Dengan menggunakan kasus di atas, analisislah birokrasi Indonesia melalui perspektif yang memandang aspek positif dan negatif dari lembaga tersebut*
- b. Analisislah reformasi birokrasi yang harus dilakukan terkait kebijakan yang menyebabkan munculnya kasus-kasus di atas!*

#### Jawaban 3 dari 4:

- a) Ketiga kasus yang viral tersebut telah ditanggapi oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan kunjungan beliau ke Kantor Ditjen Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 27 April 2024. Beliau memberikan pengarahannya agar jajaran Bea Cukai terus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan memberikan edukasi dan penerangan yang jelas.

Jadi dapat ditafsirkan dari pengarahannya ini, agar persepsi publik terhadap lembaga birokrasi yang namanya Bea Cukai itu bukanlah dipandang sebagai sekedar “aparatus pemerintah” yang berfungsi sebagai “pemungut pajak” dan menghasilkan pendapatan untuk keuangan negara, tetapi juga sebagai lembaga edukasi pada masyarakat warga-negara agar menjadi warga-negara yang taat membayar pajak (*tax-paying society*). Masyarakat yang taat membayar pajak merupakan masyarakat madani, yang menjadi fondasi terpenting dari keberlangsungan suatu negara modern. Tanpa ketaatan masyarakat membayar pajak, dalam hal ini bea-masuk atas barang yang dibawa dari luar-negeri, maka negara akan runtuh. Selain itu, ketaatan membayar cukai atas barang yang dibawa dari luar-negeri, juga menunjukkan rasa nasionalisme, sehingga negara dapat melindungi produksi dalam negeri. Misalnya dalam kasus sepatu, jika tanpa ketaatan membayar cukai, maka masyarakat akan cenderung untuk berbelanja di luar-negeri, karena harga sepatu itu jatuhnya akan menjadi lebih murah jika dibeli di luar negeri.

- b) Untuk selanjutnya, dalam rangka Reformasi Birokrasi, maka memang seyogyanya jajaran Ditjen Bea Cukai seharusnya *bebenah* sesuai arahan ibu Menkeu, yaitu menampilkan dirinya lebih sebagai pelayan masyarakat, daripada “abdi negara” yang bertugas memungut pajak dari masyarakat untuk di-setor ke negara. Dalam hal ini jajaran Ditjen Bea Cukai dapat menggiatkan diri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang taat membayar pajak. Tapi tentu saja, hal tersebut harus dibarengi dengan metode dan SOP penetapan Bea Cukai yang “masuk akal”, dengan dilandaskan pada berbagai pertimbangan, misalnya:

- (1) Menetapkan tarif bea-masuk berdasarkan nilai barang yang sama produksi dalam negeri. Misalnya dalam kasus sepatu, yang katanya dibeli di luar-negeri dengan harga Rp. 10,5-juta. Jika di dalam negeri, sepatu produk nasional yang setara kualitasnya hanya bisa dibeli dengan harga Rp. 40 juta, maka wajar jika dikenakan tarif cukai Rp. 30-juta supaya harganya setelah dikenai pajak adalah Rp. 40,5 juta, masih lebih mahal dari produk nasional. Tapi jika produk nasional yang setara dapat dibeli dengan harga Rp. 12-juta, maka tentu cukai Rp. 30-juta menjadi tidak wajar dan tidak masuk akal.
- (2) Menetapkan tarif bea-masuk berdasarkan asal-usul dari barang-barang yang masuk. Misalnya jika barang-barang tersebut berasal dari sumbangan lembaga *charity* di luar-negeri untuk lembaga sosial, tentu tidak masuk akal jika dikenakan bea-masuk yang tinggi. (Pengalaman pribadi: saya pernah mendapatkan sumbangan berupa alat laboratorium gratis dari luar-negeri, terpaksa saya minta di-re-ekspor karena tidak mampu membayar bea-

masuk yang ditetapkan).

- (3) Menetapkan tarif bea-masuk berdasarkan maksud tujuan dari pemasukan barang-barang. Tentu saja harus dibedakan barang-barang yang di-impor untuk tujuan komersial, dengan barang-barang yang di-impor dengan maksud non-komersial dan *non-profit*. Dalam hal ini Ditjen Bea Cukai harus teliti, jangan sampai pembedaan ini di-salah-guna-kan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab untuk menghasilkan keuntungan pribadi atau usaha.

Pertanyaan 4 dari 4:

*Dalam eskalasi konflik Israel dan Palestina yang semakin tinggi, Indonesia secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Dukungan politik diberikan melalui berbagai forum internasional seperti PBB, OKI, termasuk memberikan pandangan hukum di Mahkamah Internasional. Sedangkan untuk bantuan kemanusiaan, Indonesia mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan dan lainnya baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah.*

*(Sumber: <https://kemu.go.id/portal/id/read/5842/berita/menlu-ri-indonesia-tidak-akan-menyerah-dukung-palestina>)*

*Pertanyaan:*

*a. Analisislah landasan Politik Luar Negeri Indonesia yang menyebabkan konsistensi dukungan luar biasa terhadap Palestina dalam konflik ini!*

*b. Analisislah mengapa dukungan terhadap Palestina ini merupakan isu strategis bagi kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia!*

Jawaban 4 dari 4:

- (a) Salah satu semboyan yang didengung-dengungkan oleh bangsa Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan. Dalam hal mencintai perdamaian dan lebih mencintai kemerdekaan ini, maka landasan Politik Luar Negeri Indonesia adalah politik “bebas-aktif”. Bebas dalam arti bebas (netral) dari tekanan pihak-pihak mana pun yang sedang bertikai, dan aktif dalam arti ikut-serta secara aktif, baik dalam diplomasi mau pun dalam upaya-upaya bantuan kemanusiaan dan bantuan militer jika diperlukan. Terkait dengan konsistensi dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina, landasan utamanya adalah **landasan historis**. Sebagai sama-sama bangsa yang (pernah) mengalami kolonialisme dan imperialisme, kemudian berjuang secara fisik untuk merebut kemerdekaan, maka landasan Politik Luar Negeri Indonesia untuk Palestina adalah keterikatan sejarah dan solidaritas. Rakyat Palestina dalam sejarahnya adalah termasuk yang pertama-tama mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Landasan kedua adalah **landasan keyakinan** (agama). Sebagai bangsa yang sama-sama mayoritas penduduknya beragama Islam, maka bangsa Indonesia dan Palestina sama-sama ber-keyakinan bahwa kota Jerusalem dan Masjid al-Aqsa adalah bagian penting dari keyakinan agama mereka untuk dibebaskan dari pendudukan kaum Zionis Israel.

Landasan ketiga adalah **landasan prinsipil** dari Politik Luar Negeri Indonesia, yaitu prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan anti-kolonialisme-imperialisme. Sejak awal Indonesia selalu memimpin gerakan non-blok yang memperjuangkan kemerdekaan serta penentuan nasib sendiri (*self-determination*), yang menjadi hak seluruh bangsa di dunia. Landasan yang keempat adalah pertimbangan **desakan domestik** dalam-negeri. Nyaris seluruh rakyat Indonesia menyuarakan dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina, sehingga menjadi landasan bagi Politik Luar Negeri Indonesia untuk menyalurkan aspirasi ini. Landasan yang kelima adalah **landasan hukum internasional**. Sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia, sebagai bangsa yang beradab, untuk senantiasa menjunjung tinggi tegaknya hukum internasional. Sebagaimana diketahui, agresi Zionis Israel ke wilayah Palestina telah menabrak berbagai ketentuan dan kaidah hukum internasional. Landasan yang keenam adalah landasan **moral dan kemanusiaan**. Agresi Zionis Israel ke wilayah Palestina yang membunuh puluhan ribu rakyat Palestina, termasuk perempuan, orang-tua dan anak-anak, jelas-jelas sudah berada di luar batas moral dan kemanusiaan.

- (b) Dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina adalah isu strategis bagi kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia, paling sedikit karena: (1) mendudukan Indonesia pada posisi terdepan dalam perjuangan anti-kolonialisme-imperialisme, (2) memperkuat hubungan diplomatik dengan sesama negara muslim dan hubungan “selatan-selatan” dengan sesama negara sedang berkembang, (3) sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia, bahkan sekarang sudah sesuai dengan aspirasi dunia, dan (4) sesuai dengan perjuangan masyarakat global untuk menegakkan keadilan dan hak azasi manusia. Selain itu, dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina merupakan posisi tawar yang kuat untuk menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara adi-daya, seperti Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Eropa, Rusia, dan China, dan dengan negara-negara muslim di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dengan landasan penegakan hukum internasional, moral kemanusiaan dan hak azasi manusia, maka dukungan Indonesia kepada Palestina akan memperkuat pengaruh Indonesia di organisasi-organisasi internasional seperti PBB, G-20, ASEAN, dan lain-lain. Di kalangan ummat Islam global, dukungan kepada Palestina juga akan membuat Indonesia dihargai dan dihormati. Citra Indonesia sebagai negara muslim yang menampilkan keberpihakan pada penegakan hukum internasional, keadilan dunia dan hak-hak azasi manusia, akan menempatkan Indonesia dalam peranan yang penting di atas panggung dunia global dan hubungan internasional.